



## Implementasi dan Tantangan Penjaminan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar: Kajian Studi Pustaka

Kholillurrohman<sup>1</sup>, Nandira Aisyatutsaniyah<sup>2</sup>

---

### Korespondensi:

[220106110065@student.ac.id](mailto:220106110065@student.ac.id)

### Afiliasi:

Pendidikan Guru Madrasah  
Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah  
dan Keguruan, Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Malang, Indonesia<sup>1</sup>

[220106110077@gmail.com](mailto:220106110077@gmail.com)

Pendidikan Guru Madrasah  
Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah  
dan Keguruan, Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Malang, Indonesia<sup>2</sup>

[220106110065@student.ac.id](mailto:220106110065@student.ac.id)

### Abstrak:

Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) berperan sebagai instrumen strategis dalam menjamin keberlangsungan pencapaian standar nasional pendidikan, terutama pada jenjang sekolah dasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*), yang difokuskan pada analisis terhadap berbagai literatur ilmiah, peraturan, serta hasil penelitian terdahulu mengenai implementasi dan tantangan sistem penjaminan mutu pendidikan di Indonesia. Kajian ini memanfaatkan sumber-sumber literatur terbitan tahun 2019 hingga 2025, yang mencakup tiga jurnal nasional mengenai penerapan mutu pendidikan dasar serta satu jurnal yang menyoroti hambatan dalam pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat sekolah dasar. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: (1).Pelaksanaan penjaminan mutu di sekolah dasar telah diterapkan melalui dua mekanisme utama, yakni Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI berfungsi membangun budaya mutu secara mandiri di lingkungan sekolah melalui siklus berkelanjutan PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Mutu). Sementara itu, SPME dijalankan oleh lembaga eksternal seperti BAN-S/M melalui proses akreditasi serta audit mutu. (2) Implementasi sistem penjaminan mutu masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya kompetensi tenaga pendidik, kurangnya dukungan pendanaan, belum optimalnya kesesuaian kurikulum, serta lemahnya sinergi di antara para pemangku kepentingan pendidikan. Melalui penelitian ini, peneliti merekomendasikan sejumlah strategi untuk memperkuat mutu pendidikan, di antaranya dengan menetapkan standar mutu yang terukur dan jelas, melakukan pemetaan mutu berdasarkan delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP), menyusun rencana pemenuhan mutu secara partisipatif, serta memperkuat mekanisme evaluasi dan audit internal secara berkala. Dengan penerapan nilai-nilai transparansi, kolaborasi, dan kepemimpinan visioner, sistem penjaminan mutu diharapkan dapat terintegrasi sebagai bagian dari budaya kerja sekolah. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan penjaminan mutu pada tingkat pendidikan dasar sangat dipengaruhi oleh konsistensi implementasi kebijakan, kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, serta keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem pendidikan yang unggul, adaptif, dan berdaya saing di tingkat global.

**Kata kunci:** Penjaminan Mutu Pendidikan; Sekolah Dasar; SPMI; Akreditasi; Tantangan Pendidikan

## A. PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki fungsi yang sangat strategis dalam mencetak karakter, mengembangkan kemampuan intelektual, serta menumbuhkan keterampilan peserta didik agar mampu beradaptasi dengan dinamika globalisasi yang semakin cepat di masa depan. Dalam konteks pembangunan nasional, pendidikan ditempatkan sebagai pilar utama dan investasi jangka panjang yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa.

Pemerintah Indonesia telah menegaskan pentingnya penjaminan mutu pendidikan melalui Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, yang menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan penjaminan mutu baik secara internal maupun eksternal. Konsep ini selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN), yang menekankan bahwa penyelenggaraan pendidikan nasional harus terintegrasi, sistematis, dan mengarah pada tujuan pendidikan nasional yakni membentuk peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, serta bertanggung jawab (Dedik dkk., 2025). Pencapaian tujuan tersebut hanya dimungkinkan apabila pendidikan dijalankan secara bermutu, terarah, dan berkelanjutan.

Menurut Elliot sebagaimana dikutip oleh Baharun dkk. (2017:63), mutu dipahami sebagai konsep yang bersifat relatif dan kontekstual, karena maknanya dapat berbeda bagi setiap individu tergantung pada waktu, tempat, serta tujuan yang ingin dicapai. Dengan kata lain, mutu tidak memiliki definisi tunggal yang absolut, melainkan harus dipahami sesuai dengan konteks dan kebutuhan tertentu di mana suatu kegiatan atau proses berlangsung. Menurut Joseph Juran, sebagaimana yang dipetik oleh M. N. Nasution (2004:7), kualitas diartikan sebagai *fitness for use* atau tingkat kesesuaian suatu produk terhadap tujuan penggunaannya, yakni sejauh mana produk tersebut mampu memenuhi kebutuhan dan memberikan kepuasan bagi pengguna. Dengan kata lain, kualitas dapat dipahami sebagai kesesuaian antara karakteristik suatu produk atau layanan dengan standar atau spesifikasi yang telah ditetapkan. Sedangkan, menurut W. Edward Deming, sebagaimana dikutip oleh Eka Prihatin (2014:127), mutu merupakan suatu upaya berkelanjutan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelanggan, baik pada masa kini maupun di masa yang akan datang. Dengan demikian, mutu tidak hanya dipahami sebagai pencapaian standar tertentu, tetapi juga sebagai komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) untuk menjawab perubahan kebutuhan dan harapan pengguna layanan dari waktu ke waktu.

Lembaga pendidikan yang bermutu tidak akan terlepas dari penilaian dan pengakuan yang resmi oleh pemerintah dan masyarakat. Dalam penilaian tersebut tentunya ada beberapa komponen penilaian yang harus dipenuhi pihak lembaga agar dapat diakui dan dinyatakan terakreditasi. Akreditasi merupakan satu diantara banyaknya instrumen yang memiliki urgensi dalam sistem pendidikan Indonesia yang digunakan untuk menilai seberapa baik kualitas atau mutu yang dimiliki oleh sebuah lembaga pendidikan. Akreditasi adalah proses penilaian resmi terhadap suatu instansi, lembaga, program, atau layanan untuk memastikan kualitas dan kualifikasinya layak serta memenuhi standar tertentu yang telah ditetapkan.

Mutu pendidikan merupakan aspek fundamental yang perlu menjadi perhatian utama pemerintah, khususnya pada jenjang Sekolah Dasar (SD), guna memastikan bahwa proses pembelajaran yang diselenggarakan telah memenuhi standar nasional yang ditetapkan serta mampu menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat (Muslihah dkk., 2024). Sekolah dasar memiliki peran strategis sebagai pondasi awal dalam membentuk kemampuan literasi, karakter, serta keterampilan berpikir kritis peserta didik. Namun demikian, hasil Programme for

International Student Assessment (PISA) yang diterbitkan oleh OECD menunjukkan bahwa capaian siswa di Indonesia berada di bawah standar internasional dalam aspek literasi dan numerasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas pendidikan dasar di Indonesia belum sepenuhnya optimal dalam mencapai standar mutu yang diharapkan. Sebagai langkah penguatan, pemerintah telah menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) yang berfungsi sebagai instrumen untuk menilai, memantau, dan meningkatkan kualitas lembaga pendidikan melalui dua mekanisme utama, yaitu penjaminan mutu internal dan penjaminan mutu eksternal.

Namun fakta dilapangan menunjukkan adanya beberapa persoalan yang dihadapi ketika pelaksanaan akreditasi dilakukan. Banyak sekolah yang belum siap baik secara administratif maupun substansial selama proses akreditasi. Persoalan dan tantangan yang biasa ditemukan lembaga pendidikan seperti ditemukan data dan fakta lapangan tidak akurat, kurang memahami instrumen penilaian, dokumen pendukung yang belum lengkap, ataupun lemahnya manajemen internal sekolah. Dengan demikian, perlu adanya pengkajian lebih lanjut terkait bagaimana implementasi penjaminan mutu yang diadakan di sekolah dasar, serta apa saja tantangan yang dihadapi selama proses pelaksanaannya.

Melalui penelitian ini, penulis bertujuan untuk menganalisis secara teoritis dan empiris implementasi serta tantangan penjaminan mutu pendidikan di tingkat sekolah dasar berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu. Kajian ini berupaya mengisi kesenjangan penelitian (research gap) yang masih terlihat dalam studi-studi sebelumnya, di mana sebagian besar penelitian mengenai penjaminan mutu pendidikan di Indonesia cenderung berfokus pada aspek konseptual dan kebijakan, namun belum banyak mengungkap dinamika implementasi di tingkat sekolah secara nyata. Selain itu, keterkaitan antara kebijakan nasional dan konteks lokal dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) masih jarang dibahas secara komprehensif. Kurangnya kajian meta-analitik yang mengintegrasikan temuan riset tahun 2019–2025 serta terbatasnya penelitian komparatif di tingkat internasional juga menunjukkan perlunya pendekatan baru untuk memahami bagaimana sistem penjaminan mutu dapat diimplementasikan secara efektif dalam konteks pendidikan dasar di Indonesia.

## **B. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis studi pustaka atau disebut juga kajian literatur yang bertujuan menggambarkan hasil temuan peneliti atas beberapa artikel, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang dijumpai. Menurut Sugiyono (2013) menjelaskan metode penelitian kualitatif dengan desain deskripsi analisis dilakukan secara intensif, melakukan analisis refleksi terhadap berbagai dokumen yang ditemukan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail. Kajian atau studi literatur ini dilakukan atas kesadaran bahwa pengetahuan akan terus berkembang seiring dinamika dan perkembangan zaman. Kajian literatur juga diartikan sebagai salah satu metode guna menelusuri dan meneliti kepustakaan dari berbagai buku, jurnal, dan tulisan-tulisan yang berkeaan dengan satu topik tertentu (Marzali, 2019)

Dalam hal ini, membuat studi literatur adalah untuk memperkaya wawasan penulis tentang topik penelitian yang sedang dilakukan, menolong penulis memformulasikan masalah penelitian, dan menolong penulis dalam menentukan teori-teori dan metode-metode dan hasil penelitian yang tepat untuk digunakan dalam penelitian yang sedang dikerjakan. Penelitian studi literatur memperoleh data dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Referensi teori yang diperoleh dengan jalan penelitian studi literatur dijadikan sebagai fondasi dasar dan alat utama bagi praktek penelitian di tengah lapangan. Jenis sumber data atau objek kajian yang digunakan dalam penelitian ini berupa artikel-

artikel ilmiah, buku, jurnal nasional dan Internasional, maupun sumber lain yang sesuai dengan tema. Selanjutnya teori yang ditemukan dari beberapa sumber tersebut akan dianalisis dan diinterpretasikan.

Berdasarkan paparan diatas, maka peneliti menggunakan metode studi pustaka untuk menganalisis dan membandingkan beberapa artikel ilmiah dan jurnal nasional yang sesuai dengan tema penelitian yang terbit pada tahun 2019-2025 sebagai acuan metode penelitian agar penelitian dapat terlaksana dengan baik. Review sistematis literatur dapat dikelompokkan menjadi beberapa tahapan, antara lain:



### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mempermudah dalam Menyusun hasil kajian literatur, maka jurnal maupun artikel ilmiah yang akan dikaji dibuat dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No	Judul	Tahun	Penulis	Hasil
1	Analisis Tantangan Peningkatan Mutu Pendidikan pada Pembelajaran Sekolah Dasar	2024	Aulia Rachma Dinayanti, Salma Annazhira, Vera Juniar, Arita Marini	Penelitian ini mencakup pengertian, faktor-faktor, indikator, dan tantangan yang memengaruhi mutu pendidikan di sekolah dasar. Selain itu terdapat aktor-faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan meliputi kualitas guru, sarana dan prasarana, kurikulum, serta manajemen pendidikan. Indikator proses, output, outcome, dan dampak merupakan kategori penting dalam mengevaluasi mutu pendidikan pada tingkat SD. Selain itu, tantangan utama yang dihadapi meliputi biaya pendidikan tinggi, perbedaan kualitas pendidikan antar wilayah, serta tantangan dalam mengimplementasikan perubahan kurikulum.
2	Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal di Sekolah Dasar	2025	Imam Fauji	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal di SDS Al I'tishom telah terlaksana. Kegiatan diawali dari perencanaan kemudian berlanjut pada pelaksanaan, monitoring, serta evaluasi. Mutu pendidikan dapat dikatakan cukup baik dalam pelaksanaannya, akan tetapi masih terdapat beberapa aspek yang masih bisa ditingkatkan, seperti adanya ketua tim SPMI. Selain itu juga bisa dilakukan pendataan terhadap kepuasan pengguna lulusan. Jika pengguna lulusan sudah puas dengan kualitas lulusan SDS Al I'tishom maka ini semakin menegaskan bahwa mutu sekolah memang sudah baik menurut penilaian internal sekolah maupun pihak eksternal satuan pendidikan.

3	Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar	2019	Dedeh Rahmawati	Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat beberapa pembahasan, antara lain: 1) Implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan dalam meningkatkan mutu sekolah belum berjalan dengan baik; 2) Ditemukan aspek kendala dalam pengimplementasian sistem penjaminan mutu pendidikan; 3) Adanya upaya atau solusi untuk mengatasi kendala yang ada.
4	Analisis Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) di Sekolah Menengah Atas	2025	M Shalahudin, Muhammad Miqdad Arromy,, Nurobiyanto, Uus Ruswandi, Bambang Samsul Arifin	Penelitian ini menyatakan bahwa penggabungan antara SPMI dan SPME dapat menjadi pola penjaminan mutu yang efektif bagi lembaga pendidikan lain, dengan menggunakan hasil evaluasi eksternal sebagai landasan guna pembenahan internal. Implikasi realistinya, sekolah lain dapat mengambil pendekatan ini untuk menumbuhkan budaya mutu yang berkelanjutan, sementara pemangku kebijakan dapat memakai temuan ini untuk menyusun pelatihan yang lebih signifikan bagi kepala sekolah dan para pendidik.

Sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya melalui beberapa jurnal kajian literatur, maka peneliti dapat membahas beberapa aspek terkait implementasi sistem manajemen mutu pendidikan secara internal dan eksternal di tingkat sekolah dasar, serta tantangan dan strategi yang dapat diberikan, sebagai berikut:

### **Pengertian Penjaminan Mutu Pendidikan**

Asal-usul istilah mutu berasal dari bahasa Latin *quails* yang berarti kualitas (Sallis, 2008). Menurut W. Edwards Deming (1998), mutu dipahami sebagai tingkat kualitas yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Sementara itu, Philip B. Crosby mengartikan mutu sebagai kesesuaian terhadap persyaratan (*conformance to requirements*), yakni sejauh mana suatu layanan dapat mencukupi standar yang telah dibakukan. Secara umum, mutu dimaknai sebagai gambaran menyeluruh mengenai karakteristik suatu produk atau layanan yang merefleksikan tingkat kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dan memberikan kepuasan kepada konsumen.

Lebih lanjut, Latif (2018) menegaskan bahwa konsep mutu mencakup tiga komponen utama: (1) kemampuan memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan, (2) fokus pada hasil serta kepuasan terhadap layanan yang diberikan, dan (3) kemampuan beradaptasi terhadap perubahan secara dinamis untuk mempertahankan kepuasan pelanggan. Berdasarkan pada Departemen Pendidikan Nasional (2001) menjelaskan bahwa mutu mencakup tiga unsur penting dalam penyelenggaraan pendidikan, yakni input, proses, dan output lembaga pendidikan. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan secara menyeluruh.

Penjaminan mutu pendidikan adalah tahapan yang bersifat sistematis, terpadu, dan terus-menerus yang bertujuan untuk menggabungkan, menganalisis, serta melaporkan kinerja organisasi sekolah sebagai dasar dalam peningkatan mutu pendidikan (Ikhwan, 2016; Aula, 2010; Suparlan, 2013). Proses ini bukan hanya berorientasi pada pemenuhan standar, tetapi juga memastikan kelangsungan pengembangan kualitas pendidikan melalui mekanisme yang terukur dan terarah.

Sebagaimana yang telah dirancang dalam Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, penjaminan mutu pendidikan ditempatkan sebagai alat paling penting yang menyatakan bahwa seluruh proses pelaksanaan pendidikan di setiap lembaga pendidikan telah mencukupi standar nasional pendidikan. Dalam konteks implementasinya, evaluasi dan audit mutu menjadi aspek penting untuk memastikan proses KBM berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

Lebih lanjut, Hoy, Bayne, dan Wood (2005) menekankan bahwa kontrol mutu dalam pendidikan mencakup empat dimensi utama, yaitu: apa yang diajarkan, bagaimana materi tersebut disampaikan, siapa yang menyampaikan, serta mekanisme apa yang digunakan untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan peninjauan. Oleh karena itu, penjaminan mutu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah dan satuan pendidikan itu sendiri sebagai pelaksana utama proses pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan.

Dalam Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 juga dijelaskan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur seluruh kegiatan peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Seluruh unsur tersebut berinteraksi secara harmonis dalam rangka menciptakan sistem yang mampu menjamin ketercapaian dan peningkatan standar mutu pendidikan secara berkelanjutan di setiap satuan pendidikan.

Tujuan utama dari sistem penjaminan mutu pendidikan yaitu untuk memastikan bahwa Standar Nasional Pendidikan (SNP) dapat memenuhi segala hal yang dibutuhkan satuan pendidikan dasar dan menengah secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan budaya berkualitas secara mandiri di lingkungan sekolah. Dari pernyataan tersebut, penjaminan mutu tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan, tetapi juga sebagai mekanisme pembelajaran kelembagaan yang mendorong perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).

Selain itu, sistem penjaminan mutu juga berperan sebagai mekanisme preventif untuk meminimalkan terjadinya kesalahan dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Hal ini dapat dicapai dengan cara mengefektifkan setiap tahapan kegiatan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, serta melakukan evaluasi secara berkesinambungan terhadap seluruh aspek yang terlibat dalam proses pendidikan. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Mubarak dan Apriani (2022) serta Sawaluddin (2021; 2018) yang menegaskan bahwa efektivitas sistem penjaminan mutu bergantung pada sejauh mana setiap komponen pendidikan menjalankan fungsi kontrol, evaluasi, dan perbaikan secara konsisten dalam rangka mencapai keunggulan pendidikan yang berkelanjutan.

### **Penjaminan Mutu Pendidikan Di Sekolah Dasar**

Penjaminan mutu pendidikan di Indonesia dilaksanakan melalui dua sistem utama, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) serta Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) Dikdasmen. Pertama, SPMI Dikdasmen merupakan sistem penjaminan mutu yang diselenggarakan secara mandiri oleh satuan pendidikan melalui siklus berkelanjutan yang meliputi lima tahapan utama, yakni pemetaan mutu, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penetapan standar baru atau yang dikenal dengan siklus PPEPP (Fauji dkk., 2025).

Secara konseptual, SPMI Dikdasmen merupakan satu gabungan beberapa aspek yang terdiri dari kebijakan, struktur organisasi, dan proses yang saling berkaitan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu sesuai atau bahkan melebihi Standar Nasional Pendidikan (SNP). Sistem ini dijalankan di dalam satuan pendidikan dengan melibatkan seluruh elemen sekolah mulai dari pimpinan, para pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik untuk memastikan budaya mutu yang kondusif dan berkelanjutan telah terselenggara (Nahrowi, 2019).

Pelaksanaan SPMI mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan, termasuk pengelolaan sumber daya, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi hasil pendidikan. Seluruh proses tersebut didokumentasikan dalam lima komponen utama, yaitu: (1) dokumen kebijakan SPMI, (2) dokumen manual SPMI, (3) dokumen standar SPMI, (4) dokumen formulir SPMI, dan (5) dokumen pendukung SPMI. Untuk menjamin efektivitas implementasi SPMI, setiap satuan pendidikan perlu membentuk tim penjaminan mutu internal yang bersifat independen namun tetap berada dalam struktur organisasi sekolah. Tim ini idealnya terdiri dari unsur manajemen, pendidik, serta tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi mutu pendidikan secara konsisten dan berkesinambungan.

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) dilakukan melalui lima tahapan siklus yang saling berkesinambungan. Pertama, pemetaan mutu dilaksanakan melalui kegiatan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk mengidentifikasi kondisi riil dan kesenjangan mutu pada satuan pendidikan. Kedua, penyusunan rencana peningkatan mutu dilakukan dengan merancang Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) dan rencana aksi peningkatan mutu berdasarkan hasil pemetaan mutu, kebijakan pemerintah (termasuk kurikulum dan SNP), serta rencana strategis pengembangan sekolah. Ketiga, pelaksanaan rencana peningkatan mutu diwujudkan melalui pemenuhan standar mutu dan pencapaian SNP yang diterapkan dalam pengelolaan sekolah dan proses pembelajaran. Keempat, monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk memastikan implementasi peningkatan mutu berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Tahapan ini menghasilkan laporan pelaksanaan pemenuhan SNP dan rekomendasi tindakan perbaikan, yang menjadi dasar untuk menjamin keberlanjutan peningkatan mutu di masa mendatang. Kelima, penetapan standar mutu baru dan strategi peningkatan mutu dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan capaian sebelumnya, dengan tujuan membangun budaya mutu yang terus tumbuh dan berkembang di setiap satuan pendidikan.

Keberhasilan pelaksanaan SPMI Dikdasmen dapat diukur melalui tiga indikator utama. Pertama, indikator keluaran (output), yang mencakup kemampuan satuan pendidikan dalam menjalankan seluruh siklus PPEPP serta keberadaan organisasi penjaminan mutu internal yang berfungsi secara efektif. Kedua, indikator hasil (outcome), yaitu kesesuaian proses pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan dengan standar yang telah ditetapkan. Ketiga, indikator dampak (impact), yaitu terbentuknya budaya mutu di satuan pendidikan yang tercermin dari peningkatan hasil belajar peserta didik dan kinerja kelembagaan secara menyeluruh.

Adapun faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi SPMI Dikdasmen meliputi: budaya organisasi yang mendukung inovasi dan akuntabilitas, kepemimpinan kepala sekolah yang visioner dan partisipatif, keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, serta komitmen dan konsistensi dalam menerapkan prinsip transparansi, integritas, dan tanggung jawab bersama dalam membangun budaya mutu pendidikan yang berkelanjutan.

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) merupakan suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses yang saling terintegrasi untuk melaksanakan fasilitasi serta penilaian mutu melalui mekanisme akreditasi, guna menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu satuan pendidikan dasar dan menengah (Fauji dkk., 2025). Berbeda dengan SPMI yang dilaksanakan secara mandiri oleh satuan pendidikan, SPME dikembangkan dan dijalankan oleh unit di luar sekolah, yakni oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), serta Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah (BAN-PDM) sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pelaksanaan SPME Dikdasmen dilaksanakan melalui tiga siklus utama yang berkesinambungan. Pertama, siklus fasilitasi peningkatan mutu, yang mencakup kegiatan pemetaan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan, penyusunan rencana peningkatan mutu melalui rencana strategis pembangunan pendidikan, serta fasilitasi pemenuhan mutu di seluruh sekolah. Kegiatan ini juga mencakup monitoring dan evaluasi terhadap proses peningkatan mutu yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan dukungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). Pada level daerah, fasilitasi mutu dilaksanakan oleh dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota melalui tim penjaminan mutu pendidikan di daerah masing-masing yang bekerja sama dan berkoordinasi dengan Ditjen Dikdasmen Kemendikbud.

### **Tantangan Penjaminan Mutu Pendidikan Di Sekolah Dasar**

Tantangan yang banyak dihadapi oleh lembaga pendidikan terutama pada jenjang sekolah dasar, antara lain:

a. Keterbatasan sarana dan prasarana

Sarana prasarana merupakan faktor penting dalam menunjang keberhasilan suatu proses pembelajaran di sekolah. Akan tetapi jika fasilitas tidak dapat terpenuhi dengan baik dapat menjadi sebabnya capaian dan tujuan pendidikan tidak tercapai (Hasanah dkk., 2024). Salah satu contoh jika terdapat ruang kelas dengan dinding yang retak, atau atap yang mulai bocor, tiang sekolah rapuh, selain itu terdapat fasilitas fisik yang terbatas dapat merugikan pengalaman belajar, serta justru menghasilkan lingkungan yang menolak untuk perkembangan potensi peserta didik.

Keterbatasan dalam alat dan media untuk mengakses teknologi, sambungan internet, dan *software* untuk belajar di era sekarang dapat menjadi hambatan signifikan karena menghalangi kemampuan siswa untuk menjelajah pengetahuan, serta informasi dari dunia luar. Penggunaan teknologi selama proses belajar tidak hanya membutuhkan biaya untuk perangkat keras, tetapi juga pelatihan bagi para pendidik agar dapat memanfaatkan teknologi (Yumesri et al., 2024). Masih banyak ditemukan di sekolah-sekolah dasar bahwa guru masih menggunakan metode mengajar konvensional, seperti ceramah. Selain itu pengadaan bahan ajar yang kurang akan cenderung menghadapi kesukaran dalam mentransfer ilmu dan pengalaman secara kreatif dan tepat sasaran (Nurharirah & Effane, 2022; Hasanah dkk., 2024). Pemenuhan yang tidak cukup dari sumber daya pembelajaran yang beragam dapat merugikan perkembangan intelektual peserta didik.

b. Kurangnya kualitas sumber daya manusia yang terlatih

Dalam pengimplementasian mutu di tingkat sekolah dasar memerlukan SDM yang terlatih dan berkompeten dalam mengelola dan melaksanakan penjaminan mutu, baik secara internal maupun eksternal (Susanti, 2021). Namun, justru yang terjadi di Indonesia khususnya di sekolah dasar masih kekurangan tenaga ahli atau staf yang paham dan mau belajar. Hal ini tidak sejalan dengan kalimat bahwa kualitas atau mutu merupakan tanggungjawab dan tugas semua orang yang berada di dalam suatu organisasi (Pandipa, 2019).

c. Kurangnya sumber daya finansial

Kekurangan sumber daya finansial atau anggaran merupakan salah satu hambatan yang terus-menerus harus dihadapi oleh lembaga pendidikan (Hasanah dkk., 2024). Hal ini berdampak pada proses dan pengalaman belajar peserta didik, karena sekolah belum mampu dalam memenuhi dan mendukung kegiatan belajar-mengajar melalui fasilitas. Keadaan tersebut dapat menyebabkan kerugian dan ketidaksetaraan dalam akses terhadap fasilitas pendidikan.

Disamping itu, sumber daya finansial yang tidak tercukupi memengaruhi kualitas pengajar. Karena tidak dapat memberikan pelatihan dan pengembangan profesional untuk memajukan kualitas dan keterampilan pengajaran guru, sehingga kemampuan guru dalam mengajar serta kegiatan lainnya kurang maksimal. Aspek lain yang akan berdampak adalah penyediaan bahan ajar dan kurikulum terbaru. Pengadaan buku teks, materi pembelajaran interaktif, serta sumber belajar lainnya yang didapat secara online, tidak akan bisa diperoleh tanpa dukungan dana yang cukup. Dampak lainnya perawatan dan pemeliharaan kondisi fisik bangunan sekolah ataupun prasarana yang lain tidak terpenuhi, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang tidak aman dan nyaman. Pemeliharaan yang terabaikan justru akan membutuhkan biaya yang lebih besar karena perbaikan jangka panjang.

d. Kurikulum dan pembelajaran belum sepenuhnya optimal dan relevan

Kurikulum yang belum sepenuhnya relevan dengan kebutuhan peserta didik akan membuatnya semakin tertinggal dan tidak dapat membangun pendidikan keberlanjutan. Selain itu implementasi kurikulum yang tidak merata serta kurangnya variasi dalam metode pembelajaran dapat menyebabkan rendahnya pemahaman peserta didik. Selain itu dengan kurikulum dapat memberikan kerangka kerja bagi para guru dalam menyusun dan merancang proses pembelajaran (Yuhansil, 2020).

Dengan adanya kurikulum yang jelas dan terstruktur, guru dapat membuat strategi yang efektif dan efisien sehingga pembelajaran akan lebih terarah serta melakukan evaluasi terhadap perkembangan peserta didik yang selanjutnya para guru dapat lebih memahami dari *feedback* yang diberikan peserta didik dan dapat memperbaiki kelemahan mereka (Yuhansil, 2020). Kurikulum yang dirancang dengan baik dapat memastikan bahwa pendidikan yang diterima bukan hanya untuk penilaian akademis saja, tetapi juga holistik dan secara keseluruhan kepada peserta didik (Dinayanti dkk., 2024).

e. Kurangnya kerjasama dan partisipasi dari pihak stakeholders

Pendidikan yang berkualitas merupakan harapan dan kebutuhan dari berbagai elemen masyarakat, Melalui pendidikan mengajarkan bahwa bukan hanya kepala sekolah, guru, maupun pemerintah saja yang aktif dalam penyelenggaraan pendidikan. Tetapi dari kerjasama dengan para orangtua, organisasi, dan instansi lainnya yang dapat dijadikan sebagai mitra untuk menyukseskan kegiatan pembelajaran. Sinergitas yang tidak dibentuk berakibat pada ketidakseimbangan dalam perencanaan dan penyusunan mutu pendidikan. Tanpa keterlibatan dari semua pihak stakeholders, visi-misi dan tujuan pendidikan tidak dapat berjalan sesuai harapan, yang lebih parah lagi implementasi kebijakan terhambat. Jika masyarakat tidak ikut berpartisipasi, baik dalam memberikan dukungan moral maupun secara langsung maka potensi dalam mengoptimalkan pendidikan tidak dapat terlaksana (Ranisa dkk., 2025).

### **Strategi Penguatan Jaminan Mutu**

Beberapa strategi yang dapat dirancang dalam mengukuhkan implementasi penjaminan mutu di tingkat sekolah dasar, antara lain:

a. Penetapan standar mutu

Penetapan standar mutu merupakan langkah awal dalam sistem penjaminan mutu, karena penetapan standar mutu sebagai gambaran mutu yang akan dicapai oleh sekolah. Stakeholder pendidikan seperti orangtua, masyarakat, pemerintah dan dunia industri memiliki keinginan yang berbeda tentang mutu (A. Malik et al., 2025). Perbedaan inilah yang menjadi implikasi bagi sekolah untuk menetapkan standar mutu sebagai acuan dalam mencapai mutu pendidikan (Nanang, 2012). Oleh karena itu, kedudukan standar mutu memiliki posisi yang sangat penting dalam mewujudkan sekolah yang bermutu.

Dalam penetapan standar mutu harus melibatkan perwakilan dari masing-masing unit kerja, komite sekolah dan pengawas sekolah. Setelah menetapkan standar mutu, maka langkah berikutnya adalah melakukan pemetaan mutu.

b. Pemetaan mutu

Pemetaan mutu 8 Standar Nasional Pendidikan perlu didukung dengan bukti fisik, sehingga dapat menggambarkan mutu sekolah secara akurat dalam penjaminan mutu (Nanang & Rusman, 2017). Sebagai gambaran mutu pendidikan sekolah sebagai

bentuk untuk melakukan perbaikan mutu sekolah melalui pen yusunan program dan kegiatan peningkatan yang dituangkan ke dalam rencana kerja. Pemetaan dilakukan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan, pemetaan pada setiap indikator didukung dengan bukti fisik serta penjelasan kondisi yang telah dicapai pada setiap indikatornya (Nanang & Rusman, 2017). Selanjutnya diberikan nilai tahapan pengembangan pada setiap indikator dengan skala 1 sampai 4 sesuai bukti fisik yang ada dan kondisi yang telah dicapai.

c. Penyusunan rencana pemenuhan mutu

Penyusunan rencana pemenuhan mutu di satuan pendidikan diwujudkan dalam bentuk rencana kerja sekolah berupa rencana kerja jangka menengah maupun tahunan Sekolah sebagai suatu lembaga/institusi mempunyai satu tujuan atau lebih. Dalam langkah mencapai tujuan tersebut, perlu disusun rencana, tujuan dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Pada umumnya tujuan Sekolah tercermin dalam bentuk visi dan misi sekolah. Untuk mencapai visi dan misinya, termasuk dalam meningkatkan mutu guru semua Sekolah harus menyusun perencanaan program Sekolah dan kegiatan Sekolah yang dituangkan dalam Rencana Pengembangan Sekolah. Sebagaimana juga telah ditetapkan dalam UUSPN Nomor 20 Tahun 2003 dan PP Nomor 19 Tahun 2005, dan lebih dijabarkan dalam Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 bahwa “setiap satuan pendidikan wajib memenuhi standar pengelolaan pendidikan yang berlaku secara nasional”. Perencanaan merupakan rangkaian kegiatan pertama dalam proses manajemen, tidak terkecuali dalam meningkatkan kinerja guru. Perencanaan kinerja guru merupakan tindakan untuk masa yang akan datang demi tercapainya visi dan misi suatu sekolah. Perencanaan kinerja guru merupakan bagian dari alur proses manajemen dalam menentukan pergerakan sumberdaya manusia (guru), dari posisi saat ini menuju posisi yang diinginkan di masa depan.

d. Pelaksanaan rencana pemenuhan mutu

Pemenuhan mutu melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dalam rencana kerja jangka menengah atau tahunan meliputi: pemenuhan standar isi, pemenuhan standar proses, pemenuhan standar kompetensi lulusan, pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan, pemenuhan standar sarana dan prasarana, pemenuhan (Asy'ari et al., 2021). Standar pengelolaan, pemenuhan standar pembiayaan, dan pemenuhan Standar Penilaian Pendidikan. Implementasi pemenuhan mutu satuan pendidikan adalah realisasi seluruh program dan kegiatan yang telah dirancang dan telah tertuang dalam dokumen perencanaan pemenuhan mutu satuan pendidikan yang harus dikerjakan oleh seluruh pemangku kepentingan (Ranisa et al., 2025; Dirjen, 2016).

e. Evaluasi/audit pelaksanaan

Pengukuran dan evaluasi keterlaksanaan suatu program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan tujuan; 1) pengukuran tingkat keterlaksanaan program kegiatan yang sudah ditetapkan; 2) pengukuran komitmen dan efektifitas kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 3) penentuan “*lost of opportunity*”,kehilangan kesempatan jika program kegiatan tidak terlaksana dengan baik, 4) mendeteksi secara dini kelemahan kinerja sekolah; 5) pengukuran tingkat efisiensi waktu dan biaya program kegiatan; 6) sebagai acuan penyusunan Rencana Strategi yang akan datang; dan 7) pengukuran akuntabilitas unit kerja (N. N. Malik & Bahrani, 2025).

#### D. KESIMPULAN

Penjaminan kualitas pendidikan di sekolah dasar adalah proses penting untuk memastikan standar nasional pendidikan tercapai. Dari hasil penelitian, penerapan SPMI sudah berjalan di banyak sekolah dasar, tetapi masih menghadapi kendala pada beberapa aspek seperti tenaga pengajar, fasilitas, budaya kualitas, serta dukungan dari lembaga. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, diperlukan pengembangan kapasitas tenaga pendidik, bantuan yang terus-menerus, serta penggunaan teknologi digital sebagai alat untuk memantau kualitas.

Agar implementasi berjalan sukses, diperlukan kepemimpinan yang jelas, partisipasi semua pihak di sekolah, serta dukungan kebijakan yang konsisten dari pemerintah daerah dan pusat. Dengan demikian, penjaminan kualitas tidak hanya menjadi tugas administratif, tetapi juga menjadi bagian dari budaya kerja yang nyata.

#### REFERENSI

- Adha, M. A., Benyamin, C., Octaviarnis, I., & Thalib, D. (2018). Peran Akreditasi Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Di Sekolah Dasar. *MMP: Media Manajemen Pendidikan*, 2(2), 270–278. <https://doi.org/http://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/mmp>
- A. Ikhwan. (2016). Manajemen Perencanaan Pendidikan Islam. *Journal Edukasi (Pendidikan Islam)*, 4(1), 128–155.
- Asy ari, H., Munawwaroh, Z., & Azmi, U. (2021). Analisis Pelaksanaan Akreditasi Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MTs Pembangunan UIN Jakarta. *Jurnal Idarah: Pendidikan Dan Kependidikan*, 5(2), 143–162.
- Aula, P. (2010). Social media, *Reputation Risk and Ambient Publicity Management. Strategy and Leadership*, 38(6), 43-49. <https://doi.org/10.1108/10878571011088069>
- Darmaji, Supriyanto, A., Timan, A., & Adha, M. A. (2020). Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah di Satuan Pendidikan Dasar (Studi Kasus di SD Plus Al-Kautsar Malang). *JPDN: Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara*, 5(2), 172–186. <https://doi.org/https://doi.org/10.29407/jpdn.v5i2.13190>
- Dedik, Wibowo, A., Dewi, D. K., & Edith, I. R. (2025). Standar Nasional Pendidikan dan Akreditasi Sekolah/Madrasah. *Fatih: Journal of Contemporary Research*, 02(01), 557–562.
- Dinayanti, A. R., Annazhira, S., Juniar, V., & Marini, A. (2024). Analisis Tantangan Peningkatan Mutu Pendidikan pada Pembelajaran Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 3(9), 627–636.
- Fauji, I., Setiabudi, D. I., Baihaki, A. A., & Ruswandi, U. (2025). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal di Sekolah Dasar. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 14(1), 1351–1364.
- Hasanah, N., Nur, M. A., Rahmatillah, S. A., Darwisa, & Putri, K. H. (2024). Analisis Faktor Penghambat dan Upaya untuk Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(3), 3162–3169.
- Latief, M. L. (2018). *Teori Manajemen Pendidikan*. Kencana.
- Malik, A., Milati, E. C., & Faridah, I. (2025). Peran Akreditasi dalam Meningkatkan Penjaminan Mutu Pendidikan. *Aksi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(2), 102–112. <https://doi.org/https://doi.org/10.37348/aksi.v3i2.635>
- Malik, N. N., & Bahrani. (2025). Evaluasi dan Audit Mutu Pendidikan dalam Perspektif Manajemen Mutu Terpadu. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(02), 1–5.
- Marizal, A. (2016). Menullis Kajian Literatur. *Jurnal Etnosia (Etnograsi Indonesia)*, 01(02), 27.
- Mardhiyah, M., Saputra, A., Fahrezi, D. W., Hasri, S., & Sohiron, S. (2023). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di Sekolah dasar. *Sustainable Jurnal Kajian Mutu Pendidikan*, 6(2), 698–705. <https://doi.org/10.32923/kjmp.v6i2.4036>
- Mubarok, H., & Apriani, N. (2022). Kemampuan Guru dalam Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran untuk Meningkatkan Kualitas Hasil Belajar. *Journal of Islamic Education El Madan*, 2(1), 27-36.
- Muslihah, E., Syarifudin, E., Budiarjo, Nurlelah, & Mulyosaputro, P. (2024). Akreditasi Sebagai Upaya Penjaminan Mutu Pendidikan Di Madrasah (Penelitian Di Lingkungan Kantor

- Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang). *Jurnal Paris Langkis*, 5, 132–150. <https://doi.org/10.37304/paris.v5i1.15486>
- Nahrowi, M. (2019). Manajemen Mutu Standar. *Jurnal Auladuna*, 01(01), 122–133.
- Nanang, & Rusman. (2017). Analisis Kebutuhan Pelatihan Standar Penilaian Berbasis Data Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP) Pada Jenjang Sekolah Dasar (SD) Di Kota Makassar. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*, 24–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/jpipfip.v12i1.20605>
- Nurharirah, S., & Effane, A. (2022). Hambatan dan Solusi dalam Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan. *Karimah Tauhid*, 1, 219–225.
- Nurhasanah, A., Khansa, N. A., Munawwaroh, S. M., Arfinanti, N., & Sandani, A. (t.t.). *Peran Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dalam Mewujudkan Visi Misi Madrasah*.
- Pandipa, A. K. H. (2019). Kinerja Guru Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMA Negeri 1 Lore Utara. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 12(1), 6–8.
- Rahwati, D. (2019). *Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar*. 3(1).
- Ranisa, S., Suriansyah, A., & Purwanti, R. (2025). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan*, 4(2), 263–277.
- Sammara, R., & Hasbi, H. (2023). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dala Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Kelola: Journal of Islamic Education Management*, 8(1), 45–58. <https://doi.org/10.24256/kelola.v8i1.3569>
- Sawaluddin, S. (2018). Konsep Evaluasi Dalam Pembelajaran Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 3(1). [https://doi.org/10.25299/althariqah.2018.vol3\(1\).1775](https://doi.org/10.25299/althariqah.2018.vol3(1).1775)
- Sawaluddin, S. (2021). Evaluasi Pembelajaran Terintegrasi. *Journal of Islamic Education El Madani*, 1(1), 43–55. <https://doi.org/10.55438/jiee.v1i1.15>
- Shalahuddin, M., Arromy, M. M., Ruswandi, U., & Arifin, B. S. (2025). *Analisis Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) di Sekolah Menengah Atas*. 14(1).
- Sudarajat. (2022). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Sekolah. *JIECO: Journal of Islamic Education Counseling*, 2(1), 30–43.
- Suparlan. (2013). *Manajemen Berbasis Sekolah dari Teori sampai dengan Praktik*. PT Bumi Aksara.
- Susanti, H. (2021). Manajemen Pendidikan, Tenaga Kependidikan, Standar Pendidik, dan Mutu Pendidikan. *Asatiza: Jurnal Pendidikan*, 2(1), 33–48. <https://doi.org/10.46963/asatiza.v2i1.254>
- Yuhasnil. (2020). Manajemen Kurikulum dalam Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan. *Journal Of Administration and Educational Management (ALIGNMENT)*, 3, 214–221. <https://doi.org/10.31539/alignment.v3i2.1580>
- Yumesri, Elwida, M., & Sudur. (2024). Tantangan Akreditasi Sekolah di Era Digitalisasi Pendiidikan. *Innovate: Journal of Social Science Research*, 4(4), 13411–13425.